

# PEMBUATAN PROFIL RW BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Haryani<sup>1</sup>, Ezra Aditia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Universitas Bung Hatta Padang  
Email: irharyanimtp@yahoo.co.id

**Abstrak.** Profil Rukun Warga (RW) amat dibutuhkan tidak saja oleh Pemko/ Pemda saja tetapi juga oleh masyarakat akademisi maupun masyarakat umum dalam upaya pembangunan. Jika dilihat Profil RW di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dari tahun ketahun sangat tidak representatif dan tidak menyajikan data yang akurat dan terbaru sehingga sulit untuk dipakai oleh stakeholder. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan pembuatan profil kepada ketua RT/RW yang dimulai dari pengumpulan data, identifikasi data, tabulasi dan pemetaan RT/RW dengan menggunakan teknologi informasi (IT). Kegiatan ini dilakukan dengan memakai metode FGD, pelatihan dan pembinaan masyarakat pada tingkat RT/RW. Hasil yang diperoleh mitra dalam hal ini adalah RT/RW adalah diperolehnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyusun profil RT/RW terbaru. Pada akhirnya tersusun Profil RW VII dan RW VIII serta Album Peta berbasis masyarakat. Dengan demikian profil yang dimiliki RT/RW serta Kelurahan menjadi modal dasar bagi pembangunan yang berbasis masyarakat.

**Kata Kunci :** Profil; RW; Berbasis Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Kelurahan Pasie Nan Tigo (PNT) adalah salah satu kelurahan pesisir yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Jika dilihat dokumen Profil Kelurahan PNT dari tahun ketahun sangat tidak representatif dan tidak menyajikan data yang akurat dan terbaru sehingga sulit untuk dipakai oleh *stakeholder*. Sementara itu permasalahan yang terjadi di Kelurahan PNT cukup kompleks.

Sejak terjadi gempa pada tahun 2009 di Kota Padang dengan kekuatan 7,9 SR menyebabkan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir pada umumnya mengalami penurunan.

Tidak terkecuali Kelurahan PNT, dimana dari tahun 2008, 2009 dan 2010 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan hingga -3,56 % (Kecamatan Koto Tangah dalam Angka 2017). Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai nelayan. Besarnya persentase jumlah penduduk sebagai nelayan disebabkan karena Kelurahan PNT terletak di wilayah pesisir Samudera Hindia, sehingga memberikan peluang yang besar bagi penduduk untuk melakukan kegiatan kenelayanan dan kepariwisataan. Selain itu kawasan pantai memberikan peluang bagi masyarakat sekitarnya untuk membuka usaha seperti berdagang, mengolah

hasil tangkapan nelayan dan juga kegiatan bertukang (membuat perahu) serta mengolah kuliner khas kampung nelayan PNT.

Haryani (2012), potret kehidupan nelayan di Pasie Nan Tigo memang belum terlepas dari berbagai masalah yaitu akses dan finansial, seperti keterbatasan modal, kemiskinan hingga terjatoh oleh sistem rentenir. Terbukti dari jumlah nelayan yang terdapat di Pasie Nan Tigo, 35 % diantaranya masuk kategori miskin. Kemiskinan ini selain disebabkan oleh faktor akses dan finansial, juga disebabkan kondisi iklim dan fisiografi. Dalam satu tahun, hanya 6 - 7 bulan saja nelayan dapat melaut, sehingga kebutuhan hidup tergantung jumlah uang dengan perjanjian pembayaran setelah kembali dari melaut. Selama masa paceklik (*'bulan kalam'*/bulan gelap), kehidupan nelayan sangat tergantung pada pinjaman kepada tetangga atau rentenir. Sementara itu dari sisi fisiografis, permukiman nelayan yang berada disepanjang pantai terbuka dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia merupakan pantai yang teridentifikasi rawan bencana badai, gelombang tinggi, abrasi dan ancaman tsunami serta bencana alam lainnya (Haryani, 2018).

Selain permasalahan pemanfaatan SDA yang tidak optimal dan permasalahan SDM, permasalahan kebencanaan serta sarana prasarana, Kelurahan PNT juga memiliki permasalahan dalam hal pelayanan publik. Permasalahan pelayanan di Kelurahan PNT diantaranya adalah kantor kelurahan yang kurang representatif, data yang ada di kelurahan sangat tidak akurat dan usang, peta kelurahan (peta dasar dan peta tematik) ada tapi belum *up date* dan tidak lengkap, SDM di Kelurahan kurang cakap, tidak dilengkapi teknologi informatika yang layak, sarana dan prasarana kantor Kelurahan yang masih minim (Haryani, 2018).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan Permendagri No. 12 Tahun 2007, Profil dari pembangunan kelurahan

sangatlah diperlukan untuk menjamin adanya keselarasan perkembangan kelurahan dengan informasi dan data RT/RW. Atas dasar ini, diperlukan pendampingan pembuatan profil RT/RW, yang selanjutnya dapat diperluas menjadi profil Kelurahan. Profil RT/RW akan memberikan informasi yang valid mengenai gambaran RT/RW di kelurahan tersebut dan pada akhirnya *stakeholder* (pihak-pihak berkepentingan) dapat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan (Achsien, 2015).

Syarat data yang baik yaitu data harus obyektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, data harus mewakili (*representative*, standar baku harus kecil, suatu perkiraan (*estimate*) dikatakan baik jika kesalahan bakuannya kecil sehingga memiliki tingkat ketelitian tinggi, data dapat diandalkan (*reliable*) dan harus tepat waktu (*up to date*) serta harus relevan yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan (Mendagri RI. 2007).

Ketika berbagai pihak membutuhkan data, maka pihak kelurahan PNT tidak dapat menyediakan data sebagaimana yang diharapkan. Ketiadaan Profil kelurahan, RT/RW dan Peta yang representatif dan terbaru pada akhirnya menyulitkan semua pihak yang membutuhkan dalam memperoleh data di kelurahan. Pihak-pihak tersebut selain Pemerintah Kota Padang, SKPD, pihak swasta maupun masyarakat akademik bahkan masyarakat umum sangat membutuhkan data terbaru dan representatif sampai pada kedalam data RT/RW. Hal inilah yang menjadi dasar penting untuk dilakukannya pembinaan dan pelatihan kepada pihak RT/RW di lingkungan Kelurahan PNT sebagai ujung tombak kepemilikan data. Dengan berpartisipasi tingkat RT/RW dalam menyusun Profil RT/RW, pada akhirnya akan tersusun sebuah Profil Kelurahan yang merupakan representasi dari profil RT/RW. Data profil kelurahan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Data Profil Kelurahan juga sebagai acuan dalam perencanaan dan peluncuran program di daerah.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, bahwa pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai salah satu wilayah pesisir (Kelurahan pesisir PNT) umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggi pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Haryani, 2012).

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: a) Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, b) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, c) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, d) Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, e) Degradasi sumber-daya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan f) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai

pilar utama pembangunan nasional (Haryani, 2012).

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan terdiri dari beberapa RT/RW yang merupakan wilayah kerja lurah yang paling kecil. Setiap Kelurahan haruslah memiliki profil Kelurahan. Berdasarkan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dimana data profil Kelurahan terdiri dari; a) Potensi Sumber Daya Alam, b) Potensi Sumber Daya Manusia, c) Potensi Kelembagaan, d) Potensi Prasarana dan Sarana. Potensi kelurahan merupakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh kelurahan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat (Lail, 2015). Pendataan potensi kelurahan tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan data spesifik bagi keperluan pembangunan wilayah (kelurahan), tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan indikasi awal tentang fakta-fakta potensi wilayah, infrastruktur/ fasilitas serta kondisi sosial ekonomi dan budaya di setiap kelurahan.

Gambaran mengenai kelurahan tentunya harus selalu valid dan terbaru. Oleh sebab itu dari daftar potensi-potensi RT/RW yang merupakan lingkungan terkecil sebuah kelurahan, akan disusun dan diselaraskan atau disinkronisasi datanya menjadi sebuah profil kelurahan. Asrori (2014) menjelaskan dalam pengisian data-data potensi/profil kelurahan banyak data yang belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil kelurahan belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan perangkat kelurahan dalam mengisi potensi/profil kelurahan sering kali belum memadai, karena yang mengerjakan kurang dibekali dengan pendidikan dan peatihan pengumpu-

lan data dan penyusunan profil kelurahan; dan pengisian potensi/profil kelurahan belum menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Kelurahan dalam melakukan pendataan profil kelurahan.

Sumber informasi dalam pengumpulan data profil kelurahan adalah kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, lurah dan perangkat kelurahan, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di kelurahan dan kecamatan. Pengolahan data profil kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual. Penyusunan profil kelurahan meliputi kegiatan: a) penyiapan instrumen pengumpulan data, b) penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan, c) pelaksanaan pengumpulan data, d) pengolahan data, e) publikasi data profil kelurahan

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJM Kelurahan) yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara

swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Asrori, Supratiawan, A. (2014). *Pen-dayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan* dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 pasal 41 yaitu: pen-dayagunaan data Profil Desa dan Kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa/ kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintahan.

Dengan ketersediaan data potensi sumber daya dan perkembangannya secara obyektif, sah dan akurat, maka berbagai kebijakan, program dan kegiatan percepatan keberdayaan dan akselerasi kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan sosial budaya masyarakat dalam skala nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirumuskan dan dilaksanakan secara tepat, cepat, efisien, efektif serta memuaskan masyarakat yang dilayani.

Ketersediaan, kelengkapan dan akuntabilitas data merupakan satu kesatuan bentuk penyajian data yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas suatu data yang berisi berbagai sumber informasi. Yang dimaksudkan "Ketersediaan Data" adalah tersedianya berbagai jenis data terkait potensi desa dan kelurahan sedangkan "Kelengkapan

Data” adalah berbagai jenis data terkait potensi desa dan kelurahan tersebut berisi informasi yang lengkap. Bisa saja suatu informasi menyediakan berbagai data yang dibutuhkan tetapi ternyata data tersebut tidak lengkap, sebaliknya jika suatu informasi menyajikan data yang lengkap berarti data tersebut telah tersedia. “Akuntabilitas Data” dalam arti data Profil Desa dan Kelurahan yang disajikan merupakan hasil penginputan dan pengolahan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Kevalidan data hasil wawancara dengan responden juga merupakan bagian dari akuntabilitas data (Achsien, 2015).

Sebagaimana umumnya RT/RW sesungguhnya merupakan ujung tombak pembangunan di Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kabupaten, namun kondisi dilapangan terutama di daerah, yang terjadi adalah RT/-RW hanya sebagai pelengkap administrasi Negara saja. Permasalahan mitra di RT/RW Kelurahan PNT yang ditemukan adalah ketidakterediaan data/profil kedalaman RT/RW yang representatif, akurat dan terbaru. Ketiadaan data pada tingkat RT/RW disebabkan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh RT/RW dalam mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan menyusun profil RT/RW yang benar dan representatif dan ‘*up-date*’.

## METODE

Adapun metode pendekatan yang ditawarkan atas permasalahan ketidaktersediaan data di RT/RW Kelurahan PNT adalah dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai berikut. (a) Sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kelurahan tentang kegiatan PKM yang akan dilakukan dan mengajak peran serta / partisipasi masyarakat terutama RT/ RW VII dan RT/RW VIII (mitra). (b) Pemberdayaan RT/RW (1)

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam membuat Profil RT/RW, (2) Memberikan wawasan keterampilan survey data dan pengumpulan data di tingkat RT/RW, (3) Memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam menyusun/tabulasi data base RT/RW, (4) Memberikan pelatihan dan wawasan keruangan dalam membuat dan menyusun Peta RT/RW

(c) Pelaksanaan Kegiatan Survey. Pelaksanaan survey dilakukan oleh masing-masing RT/RW mitra, pencarian data penduduk, batas wilayah, potensi RT/RW mitra dan melaksanakan survey kepada setiap KK pada masing-masing RT dan RW (1) Tabulasi data hasil survey dan Penyusunan Profil RT/RW VII dan RT/RW VIII, (2) Penyusunan Peta Dasar RT/RW, (3) Pencetakan Profil dan Peta, (4) Publikasi di media cetak/koran.

Untuk mencapai tujuan program PKM ini, maka metode yang digunakan adalah Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan metode statistik.

### a. *Rapid Rural Appraisal*

Adalah sebuah metoda partisipasi tim yang ada akan menghasilkan suatu bentuk pemahaman terhadap kondisi tertentu. Suatu tim dengan anggota gabungan dari berbagai disiplin serta masyarakat lokal untuk memperoleh, menganalisa dan mengevaluasi permasalahan dalam kehidupan suatu masyarakat ataupun suatu kelompok sumber daya tertentu untuk mendapatkan suatu tindakan perbaikan.

Adapun tim yang berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini adalah dari Perguruan Tinggi, mahasiswa, masyarakat dalam hal ini RT/RW VII dan RT/RW VIII dan Pihak Kelurahan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ini untuk menghasilkan profil RT/RW berbasis partisipatif.

RRA merupakan salah satu teknik alternatif untuk melakukan suatu survei dengan metode konvensional, relatif cepat melakukan

suatu penilaian dimasyarakat setempat, mengenai kebutuhan ataupun potensi masyarakat dengan tujuan menentukan suatu strategi tertentu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Metode RRA dapat berupa interview, fokus grup, pertemuan, observasi, penelitian kecil dan analisis data.

Dengan menambah wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam membuat profil dengan cara survey yang konvensional, maka akan diperoleh potensi dan kebutuhan masyarakat untuk membangun daerahnya lebih baik.

#### b. *Participatory Rural Appraisal*

Kajian (PRA) merupakan sebuah pendekatan, metode, dan perilaku yang memungkinkan masyarakat untuk berekspressi dan menganalisis dari realitas dan kondisi kehidupan, dalam upaya merencanakan sendiri serta mengambil tindakan, memantau dan mengevaluasi hasil yang ada. Metode PRA berhasil dalam lingkup program yang mendukung kerjasama pembangunan parti-sipatif. Dalam pelaksanaannya kuesioner cenderung disusun sebelumnya tanpa melihat referensi untuk keadaan situasi lokal ataupun aspirasi masyarakat, kemampuan ataupun pengalaman.

Adanya kolaborasi dalam tim yaitu dari unsur perguruan tinggi dan masyarakat (RT/RW) adalah suatu metode yang sangat tepat bagaimana mengajarkan kepada masyarakat (RT/RW) berpartisipasi dalam pembangunan pada tingkat RT/RW yang sangat berguna untuk merencanakan, melaksanakan dan pemantauan hasil-hasil pembangunan yang ada di tempat masing-masing.

#### c. Metode Statistik

Metode statistik yaitu pemecahan masalah statistik yang terdiri atas beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, klasifikasi data, penyajian data dan analisis data. Identifikasi masalah adalah memahami

persolan yang ada secara jelas dan tepat. Data yang dikumpulkan adalah data internal maupun data eksternal. Tahap klasifikasi data yaitu data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan tahap penyajian data yaitu data yang sudah dikelompokkan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Tahap terakhir adalah analisis data yaitu interpretasi dari hasil tabulasi dan grafik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Data Umum Kelurahan

Kelurahan Pasie Nan Tigo (PNT) merupakan salah satu dari 13 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Kelurahan PNT merupakan kelurahan pesisir yang terdiri dari 14 RW. RW yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah RW VII dan RW VIII. Kelurahan PNT memiliki luas 14,57 km<sup>2</sup> (1.457 ha) dan garis pantai sepanjang 7,2 km. Kawasan pesisir Pasie Nan Tigo terletak pada ketinggian 0 – 3 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan lahan 0 – 2 %. Hal ini dipengaruhi oleh letak kelurahan ini yang berbatasan dengan laut, sehingga kelurahan ini tergolong pada dataran rendah (Haryani, 2016).

Pantai Pasie Nan Tigo termasuk kedalam bentuk pantai landai, berpasir (*Sandy Beach*) yang terdiri dari pasir coklat keabu-abuan dengan pasir yang pada umumnya berbutir kasar dan terpilah sedang serta jenis profil pantainya termasuk profil pantai *beach scarp*.

Kelurahan PNT terletak pada posisi 00°50.993' LS 100°19.431' BT memiliki lebar pantai 2 s/d 21 m. Pantai yang bertambah karena disebabkan oleh endapan *marine* yang dibawa oleh arus laut, serta masih adanya tanaman pantai yang dapat menahan dan mengendapkan material tersebut umumnya berada pada muara-muara sungai. Kelurahan PNT di batasi oleh Sungai Muaro Penyalinan sebelah selatan dan Sungai Batang Kandis sebelah utara (Haryani, 2016).

Jarak Kelurahan PNT ke Kecamatan

Koto Tangah 6 km sedangkan ke pusat Kota Padang berjarak 10 km. Menurut klasifikasi tingkat perkembangan Kelurahan PNT termasuk klasifikasi kelurahan “Swasembada”.

Kelurahan PNT terdiri dari 14 RW dan 52 RT. Jumlah pegawai Kelurahan PNT adalah 6 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 1 orang dan Golongan III sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan SLTP 4 orang dan 2 orang berpendidikan S1.

Penduduk Kelurahan PNT pada tahun 2016 berjumlah 9.441 orang terdiri dari 4.791 laki-laki dan 4.650 perempuan, sex rasio 103,03, 2.359 KK dengan jumlah rata-rata anggota keluarga 4 orang/KK. Pertumbuhan penduduk Kelurahan PNT tahun 2014-2016 sangat rendah yaitu 0,07 % Ketersediaan sarana kenelayan yaitu perahu motor tempel 295 unit, kapal motor 70 unit, nelayan penuh 1.988 orang dan nelayan sambilan 123 orang (Kecamatan Koto Tangah dalam Angka 2017).

### Profil RW VIII

Secara geografis RW VIII berbatasan langsung dengan; a) Sebelah Utara dengan RW IX, b) Sebelah Selatan dengan RW XII dan RW XIII, c) Sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan d) Sebelah Timur dengan Kelurahan Batang Kabung Ganting. Luas lahan RW VIII adalah 29,09 ha dengan jenis penggunaan dominan permukiman yaitu seluas 12,8 ha. Penggunaan lahan selain sebagai permukiman adalah kebun campuran 7,72 ha, rawa dan pantai.

**Tabel 1. Penggunaan Lahan RW VIII**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Tanah ( ha )
1	Perumahan	12,8
2	Rawa	4,7
3	Kebun Campuran	7,72
4	Perdagangan dan Jasa	0,86
5	Industri	0,43
6	Sungai	0,09
7	Pasir Pantai	2,39
8	RTH	0,1
	Jumlah	29,09

Sumber : Hasil Survey dan pengolahan data, 2018

Pada RW VIII PNT, jumlah penduduk tertinggi yaitu di RT 03 dengan jumlah penduduk 395 jiwa dan 65 KK, sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu di RT 05 dengan jumlah penduduk 173 jiwa dan 55 KK. Penduduk dari jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan dan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di RT 01 yaitu 80 jiwa/ha.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk RW VIII**

No.	RT	Jumlah Pddk	Jml KK	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	01	287	63	152	135	80
2	02	215	45	111	104	41
3	03	395	65	230	165	61
4	04	197	58	107	90	19
5	05	173	55	91	82	54
	Jumlah	1267	286	691	576	

Sumber : Hasil survey dan pengolahan data, 2018

Sarana pendidikan yang ada di RW VIII yaitu 1 unit TK dan 1 unit SD yang berlokasi di RT 04 sedangkan fasilitas kesehatan terdapat 1 orang bidan di RT 03. Ketersediaan fasilitas peribadatan sebanyak 2 unit tersebar di RT 01 dan RT 02. Fasilitas perdagangan berupa pasar pagi terdapat di dua RW yaitu RW VII dan RW VIII karena kedua RW ini berbatasan satu sama lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Jenis dan Jumlah Sarana Permukiman RW VIII**

Sarana	Lokasi	Jumlah
Pendidikan		
TK	RT 04	1
SD	RT 04	1
Kesehatan		
Bidan	RT 03	1
Peribadatan		
Mushala Darussalam	RT 01	1
Musahala Muslimin	RT 02	1
Pasar pagi	RW VII	63 lapak
Perdagangan		
Warung	RT 02	11
Warung	RT 03	10
Warung	RT 04	8
Warung	RT 05	7

Sumber : Hasil survey dan pengolahan data, 2018

**Tabel 4. Jumlah Kios Per Jenis Dagang**

No.	Jenis Dagangan	Jumlah (unit)
1	Ayam potong	1
2	Buah – buahan	1
3	Jajanan pasar	1
4	Pasar ikan	10
5	Peralatan rumah tangga	1
6	Ruko	4
7	Sayur mayur	13
8	Sembako	8
9	Warung	3
10	Warung makan	1
	Jumlah	43

Sumber : Hasil survey dan pengolahan data, 2018

Prasarana jalan dilihat dari jenis jalan di RW VIII adalah jalan aspal sepanjang 1.267 m, jalan beton 953 m dan jalan tanah 766 m. Jalan aspal dan beton umumnya dalam kondisi baik sedangkan jalan tanah dalam kondisi buruk yaitu sepanjang 698 m. Kondisi jalan buruk terdapat di RT 02, RT 03 dan RT 05. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5: Jalan Berdasarkan Perkerasan**

RT	Perkerasan Jalan (meter)		
	Aspal	Beton	Tanah
01	257	143	64
02	319	83	173
03	165	102	217
04	310	453	312
05	216	172	-
Jumlah	1.267	953	766

Sumber : Hasil survey dan pengolahan data, 2018

**Tabel 6: Jalan Berdasarkan Kondisi**

RT	Kondisi Jalan (meter)	
	Baik	Buruk
01	265	-
02	303	171
03	273	215
04	759	312
05	388	-
Jumlah	1.988	698

Sumber : Hasil survey dan pengolahan data, 2018

Kondisi drainase di RW VIII umumnya buruk. Terdapat sepanjang 918 m drainase dalam kondisi buruk dan hanya sepanjang 199 m dalam kondisi baik. Dengan kondisi drainase yang buruk, maka RW VIII sering mengal-

ami banjir, walaupun kondisi drainase bukan satu-satunya penyebab banjir karena selain itu juga dipengaruhi banjir rob yaitu naiknya permukaan air laut.

**Tabel 7. Drainase Berdasarkan Kondisi**

RT	Kondisi Drainase (m)	
	Baik	Buruk
01	68	113
02	35	243
03	69	211
04	-	351
05	27	-
Jumlah	199	918

Sumber : Hasil survei dan pengolahan data, 2018

Terdapat 351 unit bangunan di RW VIII yang didominasi bangunan hunian yaitu sejumlah 234 unit dan perdagangan dan jasa 86 unit. Sedangkan fungsi bangunan lainnya yaitu bangunan fasilitas kenelayanan, peribadatan, industri mebel dan sarana pendidikan. Jika dilihat dari kondisi bangunan sebagian besar (90,3 %) dalam kondisi baik dan hanya sebagian kecil dalam kondisi buruk. Sedangkan jika dilihat dari permanensi, bangunan permanen sebanyak 75,8 %, semi permanen 9,4 % dan bangunan temporer sebanyak 14,8 % dari 315 unit bangunan. Selengkapnya jenis bangunan dan kondisi bangunan pada masing-masing RT dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 berikut.

**Tabel 8. Jenis Bangunan di RW VIII**

No	Jenis	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	Jml
1	Hunian	34	68	59	51	22	234
2	Perdagangan dan jasa	50	11	10	8	7	86
3	Fasilitas Nelayan	6	7	3	2	-	18
4	Fasilitas Umum	1	1	-	-	-	2
5	Sarana Peribadatan	1	-	1	-	-	2
6	Industri Mebel	-	7	-	-	-	7
7	Sarana Pendidikan	-	-	-	2	-	2
	Jumlah (unit)	92	94	73	63	29	351

Sumber: Survei Lapangan, 2018

**Tabel 9. Kondisi Bangunan di RW VIII**

No	Kondisi	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	Jml	%
1	Baik	74	85	72	58	28	317	90,3
2	Buruk	18	9	1	5	1	34	9,7
Jumlah (unit)		92	94	73	63	29	351	100

Sumber: Survei Lapangan, 2018

**Tabel 10: Permanensi Bangunan di RW VIII**

No	Permanensi	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	Jml	%
1	Permanen	52	74	65	51	24	266	75,8
2	Semi permanen	8	13	3	6	3	33	9,4
3	Temporer	32	7	5	6	2	52	14,8
Jumlah (unit)		92	94	73	63	29	351	100

Sumber: Survei Lapangan, 2018

Bangunan dilihat dari luas lantai bangunan di RW VIII sangat bervariasi, namun didominasi bangunan dengan luas lantai 101-300 m<sup>2</sup> yaitu sebesar 55,6 % dan luas lantai 41-100 m<sup>2</sup> sebesar 28,2 %. Selain itu ada juga bangunan dengan luas lantai < 10 m<sup>2</sup> dan ada juga yang > 301 m<sup>2</sup>.

Tingkat kepadatan bangunan di RW VIII umumnya rendah yaitu antara 6-26 unit/ha. Kepadatan RT 01 yaitu 26 unit/ha sedangkan di RT 04 hanya sebesar 6 unit/ha. Selengkapnya luas lantai dan kepadatan bangunan di RW VIII dapat dilihat pada tabel 11 dan 12 berikut.

**Tabel 11. Luas Lantai Bangunan di RW VIII**

No	Luas Lantai m <sup>2</sup>	RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	Jumlah	%
1	< 10	4	-	-	-	-	4	1,3
2	11 – 40	28	13	4	3	3	51	14,5
3	41 – 100	21	39	16	14	9	99	28,2
4	101 – 300	39	42	52	45	17	195	55,6
5	>301	-	-	1	1	-	2	0,4
Jumlah (unit)		92	94	73	63	29	351	100

Sumber: Survei Lapangan, 2018

**Tabel 12. Tingkat Kepadatan Bangunan RW VIII**

No	RT	Kepadatan Bangunan (unit/ha)
1	01	26
2	02	18
3	03	11
4	04	6
5	05	9

Sumber: Survei Lapangan, 2018

Bencana yang paling sering terjadi pada RW VIII yaitu bencana banjir, ini dikarenakan selain drainase yang tidak memadai juga adanya banjir rob. Selain banjir ancaman bencana abrasi pantai sangat tinggi bahkan abrasi terus terjadi yang mengakibatkan beberapa fasilitas kenelayanan, 1 unit jembatan dan beberapa rumah warga hanyut. Pantai semakin lama semakin berkurang sehingga sangat mengancam harta benda dan nyawa. Untuk penanggulangan atau pencegah terjadinya abrasi pantai sudah dibuatnya batu krip di sepanjang pantai sebanyak 8 buah dengan panjang 15 m. Jarak antara batu krip satu dengan batu krip lainnya adalah 90 meter.

## Profil RW VII

RW VII merupakan RW yang terdapat di utara Kelurahan PNT yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan bandar udara Bandara Internasional Minangkabau. Luas RW VII adalah 37.94 ha yang terdiri dari 4 RT yang merupakan wilayah pesisir.

Dilihat dari penggunaan lahan RW VII terdiri dari permukiman, obyek wisata pantai dan kebun. Terdapat salah satu obyek wisata pantai Kota Padang yaitu wisata pantai Pasir Jambak. Luas masing-masing jenis penggunaan lahan di RW VII dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 13. Penggunaan Lahan RW VII**

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
Objek Wisata Cinta	2,36
Lahan Kelapa	5,16
Lahan Karantina Pertanian	1,85
Permukiman	9,46
Lahan Nipah	2,2
Rawa	2,07
Tempat Wisata	1,6
Pepohonan	6,1
Semak	1,1
Lahan Terbuka	3,9
Sungai	2,0
Lahan Nipah	0,14
Jumlah	37,94

Sumber: Hasil survei dan pengolahan data 2018



## Evaluasi PKM

Evaluasi pra dan pasca pelaksanaan PKM dilakukan adalah untuk mengukur sejauh apa keberhasilan PKM di RW VII dan RW VIII Kelurahan PNT. Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan PKM, yang dilakukan adalah sosialisasi dan desiminasi program PKM Pembuatan Profil RW berbasis masyarakat. Pada tahap sosialisasi yang diundang adalah RT/RW pesisir saja yaitu sejumlah 9 RW beserta RT masing-masing, Lurah, staf kelurahan. Walaupun yang menjadi mitra adalah RW VII dan RW VIII namun semua RW pesisir di undang. RW pesisir yang diundang yaitu RW III, RW IV, RW VI, RW VII, RW VIII, RW IX, RW X dan RW XII. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh apa partisipasi masyarakat pesisir dalam kegiatan ini.

Kegiatan sosialisasi dan desiminasi di hadiri oleh 4 Ketua RW (VI, IX, X, XII) dan 1 RT serta Lurah PNT. Pasca pelaksanaan kegiatan PKM dihadiri oleh 8 Ketua RT yaitu Ketua RW III, RW IV, RW VI, RW VII, RW IX, RW X, RW XII dan RW XIII serta 2 RT yaitu RT 01/VII dan RT 01/VIII. Ketua LPM dan Lurah juga hadir pada kegiatan ini. Jika dilihat jumlah kehadiran pada pertemuan akhir lebih banyak dibanding pertemuan awal. Pada pertemuan akhir, jumlah peserta naik 100 % yaitu 12 orang.

Pertanyaan yang diajukan pada tahap sosialisasi dan penjelasan sama dengan pertanyaan pada tahap akhir kegiatan PKM. Pada kegiatan sosialisasi semua peserta (RT/RW) pernah mengikuti Musrenbang walaupun hanya 33,3 % pernah ikut pelatihan penyusunan profil RW. Seluruh peserta mengerti akan manfaat sebuah profil bagi pembangunan diantaranya adalah bermanfaat untuk Musrenbang, bermanfaat untuk mengetahui potensi SDM dan SDA serta kondisi sarana dan prasarana. Menurut peserta profil tersebut berisi informasi dan data yang tertuang dalam bentuk peta (50 %) dan gambar (50 %). Para peserta

berpendapat bahwa kegiatan serupa pelatihan penyusunan Profil RW/Kelurahan ini sangat bermanfaat (91,7 %).

Pasca pelaksanaan kegiatan PKM yang dihadiri sebanyak 12 orang RT/RW, sebanyak 8 orang (66,7 %) tidak pernah ikut pelatihan serupa pembuatan profil RW/Kelurahan dan hanya 2 orang yang pernah mengikuti Musrenbang namun pernah mendengar Profil RW/Kelurahan (8 orang/66,7 %). Menurut peserta Profil RW/Kelurahan adalah dokumen yang memuat data-data RT/RW (25 %) dan peta-peta (66,7 %). Profil RW/Kelurahan ini bermanfaat untuk Musrenbang (25 %), mengetahui potensi SDM, SDA dan sarana prasarana RW/Kelurahan (58,3 %). Sehingga sebanyak 91,7 % berpendapat bahwa kegiatan pelatihan penyusunan Profil RW/Kelurahan ini sangat bermanfaat.

Keberlanjutan kegiatan PKM dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki peserta pasca kegiatan PKM semakin bertambah bahwa kegiatan serupa harus ditingkatkan lagi bagi RW yang belum diikutsertakan. Kegiatan PKM saat ini yang diikuti hanya 2 RW saja, namun 12 RW lainnya juga meminta untuk diikutsertakan dalam kegiatan serupa.

## SIMPULAN

Hasil dari kegiatan PKM RW VII dan RW VIII Kelurahan PNT adalah masing-masing RW telah memiliki data fisik kedalaman RT, data kependudukan dan data sarana prasarana yang terbaru dimana data diperoleh dari sumber langsung dilapangan bersama masyarakat. Data-data tersebut telah diolah kedalam bentuk tabulasi sehingga menjadi profil RW, album peta dan gambar profil RW.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, S.N., Cangara, H., Unde, A.A..  
2015. Profil Desa Dan Kelurahan Sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi

- Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (Bpmpdk) Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(4): 449-467.
- Asrori, Supratiawan, A.. 2014. Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Profil Potensi Desa. *Jurnal Bina Praja*, 6 (4): 283 – 29.
- Haryani. 2012. Model Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dengan Pemberdayaan Masyarakat. *Tata Loka*, 14 (3): 201-212
- Haryani, Lusi, U. 2016. Revitalization of Coastal Area Pasie Nan Tigo Padang City for Hazard Mitigation. *Mimbar*, 32(1): 49-57.
- Haryani, Huda,N. 2018. Developing Fishing Tourism Destination Based On “Anak Nagari” Concept In Padang City. *Mimbar*, 34 (1): 51-60.
- Lail, J., Pradita, K. 2015. Pembuatan Profil Dukuh Sentono. Seri Pengabdian Masyarakat 2015 *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 4 (2): 109-111.
- Kecamatan Koto Tangah. 2017. *Kecamatan Koto Tangah dalam Angka 2017*. Padang: BPS Kota Padang.
- Mendagri RI. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD). Kementerian Dalam Negeri RI : Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *tentang Kelurahan* .
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 *tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan*.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*